

Katalog No: 92010001.8207



INDIKATOR EKONOMI 2021
KABUPATEN PULAU MOROTAI

<https://www.pulaukab.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

Katalog No: 92010001.8207



INDIKATOR EKONOMI 2021
KABUPATEN PULAU MOROTAI



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

Indikator Ekonomi
Kabupaten Pulau Morotai
Tahun 2021

No. katalog BPS : 9201001.8207
Ukuran Buku : 14.28 cm × 21 cm
Jumlah Halaman : vii + 38 halaman
Naskah : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Gambar Kulit : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Diterbitkan Oleh : BPS Kabupaten Pulau Morotai
Dicetak Oleh : BPS Kabupaten Pulau Morotai

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas kehendaknya Publikasi tahunan “Indikator Ekonomi Kabupaten Pulau Morotai tahun 2021” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penerbitan Publikasi ini bertujuan untuk memenuhi ketersediaan data di Kabupaten Pulau Morotai terutama yang terkait dengan bidang ekonomi.

Publikasi ini berisi data dari beberapa indikator ekonomi. Penyajian publikasi ini berbentuk penjelasan yang disertai dengan tabel, serta ulasan sederhana mengenai perkembangan indikator ekonomi Pulau Morotai selama tahun 2021.

Publikasi ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam mengevaluasi keberhasilan program yang telah dijalankan selama ini, selain itu publikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penerbitan publikasi ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan publikasi serupa di masa yang akan datang.

Morotai , Agustus 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pulau Morotai

Heru Agung Santoso, S.ST, M.Stat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I Produk Domestik Regional Bruto	1
BAB II Pertanian sebagai Sektor Utama Perekonomian	11
BAB III Keuangan Daerah	17
BAB IV Transportasi Laut dan Udara	24
LAMPIRAN	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah).....	2
Tabel 2. PDRB per Kapita Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2021	8
Tabel 3. Sumber Penerimaan Daerah & Kontribusinya di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021.....	20
Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021.....	21
Tabel 5. Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenis pengeluaran di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021	22
Tabel 6. Jumlah dan Perkembangan Kunjungan Kapal Laut pada Pelabuhan di kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021	23
Tabel 7. Jumlah dan Perkembangan Penumpang Angkutan Laut Pada Pelabuhan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021.....	24
Tabel 8. Jumlah dan Perkembangan Angkutan Barang pada Pelabuhan Laut di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021.....	25

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2021	3
Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2021	5
Grafik 3. Pertumbuhan Ekonomi untuk tiga kategori dengan <i>share</i> PDRB terbesar tahun 2021	6

BAB I

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah

dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Indikator ekonomi yang akan diuraikan dalam tinjauan perekonomian Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan PDRB Menurut Lapangan Usaha meliputi nilai nominal PDRB, struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, PDRB per Kapita dan Indeks Harga Implisit.

Tabel 1. PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
(1)	(2)	(3)
2017	1.318.618,36	927.175,66
2018	1.438.405,87	989.167,35
2019	1.528.461,54	1.031.739,81
2020*	1.579.266,54	1.056.095,66
2021**	1.648.119,98	1.083.770,05
*) Angka Sementara		
**) Angka Sangat Sementara		

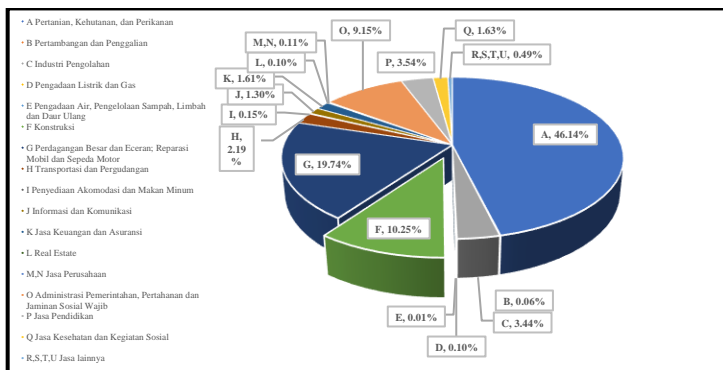
PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian atas dasar harga berlaku dimaksudkan untuk memperoleh gambaran besaran nilai tambah yang bisa dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, sedangkan atas dasar harga konstan dimaksudkan untuk melihat secara rill besaran nilai tambah yang dihasilkan setelah pengaruh harga dihilangkan.

Berdasarkan hasil penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku, dari nilai tambah yang diciptakan, perekonomian Kabupaten Pulau Morotai tahun 2021 mampu menghasilkan PDRB sebesar Rp. 1,65 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp. 1,58 triliun. Nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2021 mencapai Rp. 1,08 triliun. Nilai tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp. 1,05 triliun.

Dari Periode Tahun 2017-2021 baik PDRB Atas Harga Berlaku maupun PDRB Atas Harga Konstan cenderung meningkat setiap tahunnya.

Secara umum, struktur ekonomi menggambarkan besarnya peranan masing-masing kategori lapangan usaha dalam penciptaan PDRB suatu daerah. Disamping itu, struktur ekonomi juga dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap suatu kategori. Kategori lapangan usaha yang mempunyai peranan yang cukup besar akan menjadi andalan bagi daerah.

Grafik 1. Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2021



Struktur PDRB Kabupaten Pulau Morotai menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku tahun 2021 didominasi tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 46,14 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,74 persen, dan Konstruksi sebesar 10,25 persen.

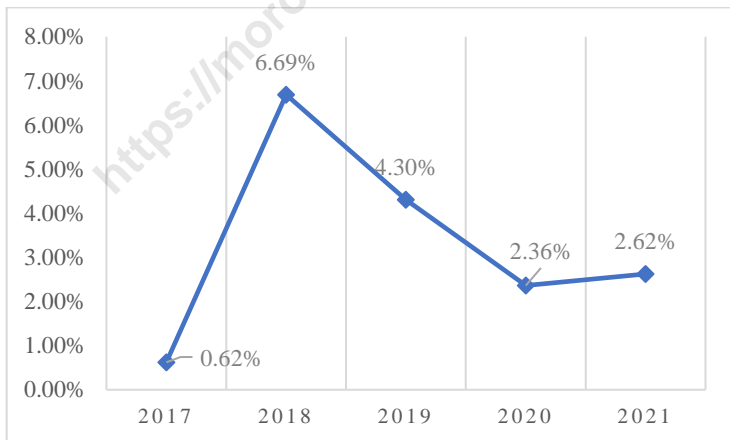
Secara umum peranan masing-masing kategori lapangan usaha selama periode tiga tahun terakhir dari tahun 2017 hingga tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti, cenderung masih berada dikisaran angka yang sama. Secara lebih rinci, besarnya andil masing-masing kategori yang menjadi motor penggerak perekonomian Kabupaten Pulau Morotai berada pada struktur perekonomian yang cenderung sama setiap tahunnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan memberi gambaran tentang tingkat ekonomi yang terjadi, dimana pergerakan laju pertumbuhan ini merupakan indikator penting untuk mengetahui hasil pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah kebijakan dan sasaran pembangunan dimasa yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Morotai tahun 2021 sebesar 2,62 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi produksi, PDRB Kabupaten Pulau Morotai cenderung mengalami peningkatan dan penurunan di semua sektor yang cukup bervariasi, Namun terdapat 2 sektor yang mengalami penurunan yang signifikan yaitu sektor Industri Pengolahan sebesar -0,99 persen di tahun 2020 menjadi -10,52 persen di Tahun 2021 dan

sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 4,86 persen di tahun 2020 menjadi -0,66 di tahun 2021. Adapun sektor yang mengalami peningkatan secara signifikan yakni Transportasi dan Pergudangan dari sebesar -9,76 persen menjadi 1,48 dan sektor Jasa Lainnya dari sebesar 1,81 persen menjadi 7,79. Hal ini kemungkinan besar terjadi akibat adanya pemulihan aktivitas ekonomi dari masa pandemi COVID-19 di tahun 2021. Secara keseluruhan di Tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan yang cenderung fluktuatif namun secara agregat pertumbuhan cenderung mengalami peningkatan.

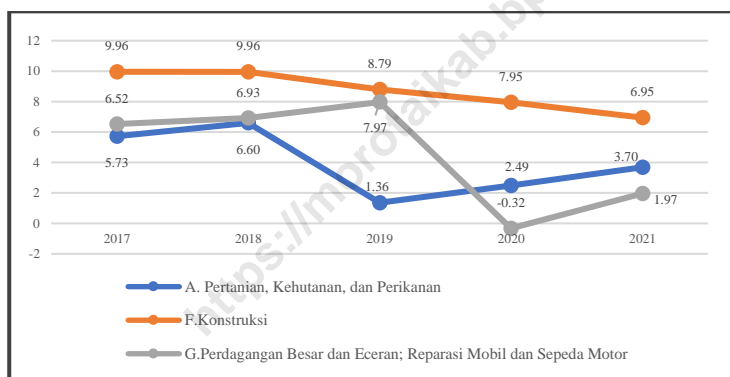
Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2021



Besarnya andil suatu kategori terhadap nilai total PDRB suatu daerah juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan kata lain, pergerakan kategori lapangan usaha yang memiliki andil besar memiliki pengaruh yang besar juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Dominasi tiga lapangan usaha tersebut akan

sangat berpengaruh terhadap perekonomian kabupaten Pulau Morotai. Laju pertumbuhan untuk kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2021 adalah mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,70 persen, sedangkan untuk Perdagangan besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor mengalami peningkatan yang signifikan menjadi sebesar -1,97 persen, dan untuk Konstruksi sebesar 6,95 persen menurun cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Grafik 3. Pertumbuhan Ekonomi untuk tiga kategori dengan *share* PDRB terbesar tahun 2021



Jika melihat pertumbuhan pada masing-masing kategori di tahun 2021, terdapat 9 kategori yang pertumbuhannya berada diatas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Morotai (diatas 2,62 persen), yaitu kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Kategori Pertambangan dan Penggalian, Kategori Pengadaan Listrik dan Gas, Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Kategori Konstruksi, Kategori Transportasi dan Pergudangan, Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,

Kategori Informasi dan Komunikasi dan Jasa Keuangan dan Asuransi

Sedangkan 9 kategori lainnya berada dibawah angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Morotai diantaranya yaitu Kategori industri pengolahan, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Kategori Real Estate, Kategori Jasa Perusahaan, Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Kategori Jasa Pendidikan, Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Kategori Jasa lainnya. Adapun kategori dengan pertumbuhan yang paling kecil adalah Kategori industri pengolahan -10,52 persen.

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat, dimana pendapatan per kapita ini dapat didekati dengan PDRB per kapita. Namun demikian, PDRB per kapita ini tidak secara langsung dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan/kemakmuran suatu kelompok masyarakat.

PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama. Dengan demikian, PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya dua variabel tersebut. Dengan kata lain, jika nilai PDRB besar sedangkan jumlah penduduknya sedikit maka PDRB per kapita akan menjadi besar, sebaliknya apabila nilai PDRB kecil sedangkan jumlah penduduknya banyak maka PDRB per kapita akan menjadi kecil nilainya.

Angka PDRB per kapita dinilai dengan dua cara, yaitu PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB per kapita ADHB dapat menggambarkan

NTB per kapita yang masih dipengaruhi harga komoditi yang dihasilkan. PDRB per kapita ADHK adalah pertumbuhan nyata ekonomi per kapita, umumnya digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur ekonomi rakyat secara keseluruhan. Walaupun terjadi peningkatan PDRB per kapita akan tetapi hal ini belum dapat menggambarkan tingkat penyebaran pendapatan masyarakat di setiap strata ekonomi.

Tabel 2. PDRB per Kapita Kabupaten Pulau Morotai 2017-2021

Tahun	PDRB Per Kapita	
	ADHB	ADHK
(1)	(2)	(3)
2017	20.603.090,03	14.486.893,46
2018	21.935.947,39	15.084.979,36
2019	22.716.567,70	15.334.103,49
2020*	21.216.434,87	14.187.969,09
2021**	21.656.723,68	14.241.019,31

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB per kapita penduduk kabupaten Pulau Morotai atas dasar harga berlaku cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2017 sebesar 20,60 juta rupiah, tahun 2017 meningkat menjadi 21,93 juta rupiah, tahun 2018 sebesar 22,71 juta rupiah, tahun 2019 sebesar 22,71 juta rupiah kemudian mengalami penurunan di tahun 2020

menjadi 21,21 juta rupiah dan tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 21,65 juta rupiah. Akan tetapi kenaikan PDRB perkapita tersebut tidak riil, karena angka tersebut masih dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa. PDRB perkapita yang riil tercermin dari nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan, dimana pendapatan sebesar 14,48 juta rupiah pada tahun 2017, meningkat di tahun 2018 menjadi sebesar 15,08 juta rupiah, pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 15,38 juta rupiah, dan menurun di tahun 2020 menjadi sebesar 14,18 dan tahun 2021 meningkat mencapai 14,21 juta rupiah.

Perlu diketahui bahwa indikator PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat pendapatan per kapita penduduk. Indikator ini lebih tepat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah bagi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Namun dengan segala keterbatasannya, indikator PDRB per kapita dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PERTANIAN SEBAGAI SEKTOR UTAMA PEREKONOMIAN

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian daerah dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangannya terhadap PDRB, penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan.

Kesadaran terhadap peran tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat masih tetap memelihara kegiatan pertanian mereka meskipun negara telah menjadi negara industri.

Sehubungan dengan itu, pengendalian lahan pertanian merupakan salah satu kebijakan nasional yang strategis untuk tetap memelihara industri pertanian primer dalam kapasitas penyediaan pangan, dalam kaitannya untuk mencegah kerugian sosial ekonomi dalam jangka panjang mengingat sifat multi fungsi lahan pertanian.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.

Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (*crop cultivation*) serta pembesaran hewan ternak (*raising*), meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau

sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan.

Sektor pertanian memiliki sumbangan terhadap nilai PDRB kabupaten Pulau Morotai hampir 50 persen. Walaupun andilnya cenderung fluktuatif untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2021, kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB kabupaten Pulau Morotai sebesar 46,14 persen. Angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang memiliki kontribusi sebesar 45,70 persen. dalam 5 tahun terakhir ini, kontribusi sektor pertanian cenderung mengalami penurunan dari tahun 2017-2019 dan mengalami kenaikan di tahun 2020-2021.

Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, pertanian juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.

Usaha pertanian diberi nama khusus untuk subjek usaha tani tertentu. Kehutanan adalah usaha tani dengan subjek tumbuhan (biasanya pohon) dan diusahakan pada lahan yang setengah liar atau liar (hutan). Peternakan menggunakan subjek hewan darat kering (khususnya semua vertebrata kecuali ikan dan amfibia) atau serangga (misalnya lebah). Perikanan memiliki subjek hewan perairan (termasuk amfibia dan semua non-vertebrata air). Suatu usaha pertanian dapat melibatkan berbagai subjek ini bersama-sama dengan alasan efisiensi dan peningkatan keuntungan. Pertimbangan

akan kelestarian lingkungan mengakibatkan aspek-aspek konservasi sumber daya alam juga menjadi bagian dalam usaha pertanian.

Semua usaha pertanian pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi sehingga memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang sama akan pengelolaan tempat usaha, pemilihan benih/bibit, metode budidaya, pengumpulan hasil, distribusi produk, pengolahan dan pengemasan produk, dan pemasaran. Apabila seorang petani memandang semua aspek ini dengan pertimbangan efisiensi untuk mencapai keuntungan maksimal maka ia melakukan pertanian intensif (*intensive farming*). Usaha pertanian yang dipandang dengan cara ini dikenal sebagai agribisnis. Program dan kebijakan yang mengarahkan usaha pertanian ke cara pandang demikian dikenal sebagai *intensifikasi*. Karena pertanian industrial selalu menerapkan pertanian intensif, keduanya sering kali disamakan.

Sisi yang berseberangan dengan pertanian industrial adalah pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*). Pertanian berkelanjutan, dikenal juga dengan variasinya seperti pertanian organik atau permakultur, memasukkan aspek kelestarian daya dukung lahan maupun lingkungan dan pengetahuan lokal sebagai faktor penting dalam perhitungan efisiensinya. Akibatnya, pertanian berkelanjutan biasanya memberikan hasil yang lebih rendah daripada pertanian industrial.

Pertanian modern masa kini biasanya menerapkan sebagian komponen dari kedua kutub “ideologi” pertanian yang disebutkan di atas. Selain keduanya, dikenal pula bentuk pertanian ekstensif (pertanian masukan rendah) yang dalam bentuk paling ekstrem dan tradisional akan berbentuk pertanian subsisten, yaitu hanya

dilakukan tanpa motif bisnis dan semata hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau komunitasnya.

Menurut Kuznets, Sektor pertanian di LDC's berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional dalam 4 bentuk:

a. Kontribusi Produk

Penyediaan makanan untuk penduduk, penyediaan bahan baku untuk industri manufaktur seperti industri: tekstil, barang dari kulit, makanan & minuman

b. Kontribusi Pasar

Pembentukan pasar domestik untuk barang industri & konsumsi

c. Kontribusi Faktor Produksi

Penurunan peranan pertanian di pembangunan ekonomi, maka terjadi transfer surplus modal & TK dari sector pertanian ke Sektor lain

d. Kontribusi Devisa

Pertanian sbg sumber penting bagi surplus neraca perdagangan (NPI) melalui ekspor produk pertanian dan produk pertanian yang menggantikan produk impor.

Peran sektor pertanian di Indonesia dinilai belum memuaskan, pemerintah justru terkesan menyampingkan masalah sektor pertanian, padahal sebagai negara agraris sektor pertanian Indonesia harusnya menarik perhatian lebih pemerintah dari segi kualitas dan fasilitas yang memadai. Sektor pertanian Indonesia menjadi salah satu sektor yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Semakin majunya sektor pertanian di Indonesia, tentu saja dapat meningkatkan perekonomian negara.

Pada tahun 2021 tanaman padi sawah memiliki luas lahan 1.200 Ha luas panen sebesar 749,74 Ha dan produksi sebesar 4.063,73 Ton. Kemudian, untuk komoditi ubi kayu memiliki luas lahan sebesar 521 Ha dengan luas panen sebesar 377 Ha dan produksi sebesar 4.710 Ton.

Pada tahun 2021 kelompok tanaman sayur-sayuran memiliki luas lahan 439 Ha, luas panen sebesar 74,71 Ha dan produksi sebesar 850,5 Ton.

Kabupaten Pulau Morotai memiliki 3 komoditi unggulan, yaitu kelapa, cengkeh dan pala. Pada tahun 2021, tanaman kelapa memiliki luas area 13.300 Ha dan produksi sebesar 9.314 Ton, cengkeh memiliki luas area sebesar 3.856 dan produksi sebesar 109 Ton, pala memiliki luas area sebesar 6.268 Ha dan produksi sebesar 102 Ton,

Terdapat empat jenis ternak di Kabupaten Pulau Morotai yang terdiri dari sapi, kambing, babi, dan unggas. Jumlah populasi masing-masing jenis ternak pada tahun 2021 secara berurutan sebanyak 9.085 ekor sapi, 10.671 ekor kambing, 3.592 ekor babi, 25.243 ekor ayam ras petelur dan 5.116 ekor ayam buras.

Pada tahun 2020 di Kabupaten Pulau Morotai tercatat luas area untuk hutan lindung sebesar 93.201,03 Ha dan Hutan produksi terbatas sebesar 56.481,03 Ha.

BAB III

KEUANGAN DAERAH

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah berubah seiring dengan adanya desentralisasi fiskal. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 58 tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 pada pasal 66 ayat 1, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output, menggunakan konsep nilai uang (*value for money*) dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Pendekatan anggaran kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dari perencanaan alokasi biaya (input) yang telah ditetapkan (PP. Nomor 105 tahun 2000, pasal 8). Kinerja mencerminkan efisiensi dan

efektifitas pelayanan publik dan harus berpihak pada kepentingan publik, yang artinya memaksimalkan penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah menyangkut tiga aspek analisis yang saling terkait satu dengan lainnya. Ketiga aspek tersebut meliputi:

1. Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.
2. Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.
3. Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Dalam konsep yang lebih luas, sistem pengelolaan keuangan daerah terdiri dari aspek-aspek berikut:

1. Pengelolaan (optimalisasi dan/atau penyeimbangan) seluruh sumber-sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan atau penghematan yang mungkin dilakukan.
2. Ditetapkan oleh badan eksekutif dan badan legislatif, dilaksanakan oleh badan eksekutif serta diawasi oleh badan legislatif dan seluruh komponen masyarakat daerah.
3. Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya.
4. Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomis, efisien dan efektif.
5. Dokumentasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu wujud pengelolaan keuangan daerah. APBD adalah sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk suatu periode, yang biasanya satu tahun. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah, dan belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Penerimaan daerah merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pemerintahan maupun pembangunan daerah. Penerimaan daerah Kabupaten Pulau Morotai selama tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, mendorong peningkatan besaran APBD yang diterima oleh pemerintah daerah. Peningkatan penerimaan daerah ini diharapkan mampu untuk mewujudkan kemandirian daerah, sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Daerah diharapkan mampu membiayai pembangunan dan menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan juga mampu mengelola anggaran tersebut secara tepat, karena dalam era desentralisasi fiskal ini, penerimaan daerah merupakan modal utama dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Penerimaan daerah terdiri dari beberapa komponen yaitu Pendapatan Asli daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

(BHPBP), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan penerimaan lain yang sah. Perkembangan penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai secara umum selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan yang besar ini tidak lain adalah disebabkan meningkatnya sumber penerimaan daerah dari dana perimbangan (DAU & DAK). Bila dilihat menurut komponen atau sumber penerimaan daerah, maka komponen terbesar dari penerimaan daerah adalah dana perimbangan yang berupa DAU, BHPBP, dan DAK yang memiliki kontribusi sekitar 78.40% dari penerimaan daerah. Sedangkan PAD hanya memberikan kontribusi sekitar 3,39%. Rendahnya proporsi penerimaan PAD dibandingkan dengan DAU mengindikasikan belum optimalnya pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam menggali sumber-sumber penerimaan. Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan PAD terhadap total penerimaan daerah antara lain adalah:

1. Tingkat hidup dan ekonomi masyarakat masih rendah
2. Belum optimalnya pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

Tabel 3. Sumber Penerimaan Daerah & Kontribusinya di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021

Sumber Penerimaan	Penerimaan (Juta Rupiah)	Persentase
(1)	(2)	(3)
PAD	32.492.440,48	4,28
Dana Perimbangan	715.615.814,52	94,29
Lainnya	10.816.481,89	1,42
Jumlah	758.924.736,90	100

Menurut Undang-Undang Nomor 33/2004 komponen PAD terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan secara umum pemerintah daerah berusaha meningkatkan penerimaan PAD melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021

PAD	Penerimaan (Juta Rupiah)	%
Pajak Daerah	5.520.285,61	16,989
Retribusi	17.886.635,92	55,04
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	391.907,49	1,20
Lain-lain PAD	8.693.611,46	26,75
Jumlah	32.492.440,48	100

Jumlah keseluruhan dana APBD baik yang berasal dari PAD maupun dana perimbangan menjadi sumber pembiayaan daerah dalam melakukan pembangunan daerah, untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kebijakan dari masing-masing pemerintah daerah.

Besarnya total belanja tidak terlepas dari bagaimana kondisi belanja masing-masing daerah. Adanya perbedaan potensi, kondisi dan kebijakan dari masing-masing daerah, mengakibatkan prioritas pembangunan dari masing-masing daerah juga berbeda.

Tabel 5. Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenis pengeluaran di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2021
(1)	(2)
A Belanja Tidak Langsung	321.779.853,24
Belanja Pegawai	187.911.119,32
Belanja Subsidi	-
Belanja Bantuan Keuangan	115.619.038,87
Belanja Hibah	2.647.900
Belanja Bantuan Sosial	15.131.093,54
Belanja Tidak Terduga	470.701,50
B Belanja Langsung	501.624.134,74
Belanja Pegawai	29.137.008,43
Belanja Barang & Jasa	177.984.232,33
Belanja Modal	294.502.893,98
<i>Jumlah / Total</i>	823.403.987,98

BAB IV

TRANSPORTASI LAUT DAN UDARA

Terdapat dua pelabuhan laut yang ada di Kabupaten Pulau Morotai yaitu Pelabuhan Imam Lastori di Desa Daruba dan Pelabuhan Ferry di Desa Juanga. Dari kedua pelabuhan tersebut kapal yang masuk ke Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 652 unit pada tahun 2021 yang seluruhnya merupakan kapal untuk pelayaran dalam negeri dengan rata-rata kapal yang masuk sekitar 54 sampai 55 kapal untuk setiap bulannya. Kunjungan kapal yang paling banyak terjadi pada bulan April 2021 dengan jumlah sekitar 75 kapal. Berdasarkan data Pelabuhan laut tahun 2021 di kabupaten pulau Morotai dapat dilihat bahwa terdapat penurunan signifikan jumlah kapal yang berlabuh dibandingkan tahun lalu sebanyak 683 kapal, hal ini mungkin diakibatkan oleh pembatasan kegiatan ekonomi semasa pandemi COVID-19 tahun 2021.

Tabel 6. Jumlah dan Perkembangan Kunjungan Kapal Laut pada Pelabuhan di kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021

Bulan	Jumlah Kapal
(1)	(2)
Januari	69
Februari	67
Maret	69
April	75
Mei	80
Juni	47
Juli	35
Agustus	32
September	36
Oktober	50
November	46
Desember	46

Pergerakan penumpang yang menggunakan jasa angkutan laut di Pulau Morotai pada tahun 2021 cukup mengalami fluktuasi setiap bulannya. Jumlah penumpang yang naik pada pelabuhan di Kabupaten Pulau Morotai adalah sebanyak 21.137 orang, sedangkan yang turun dari pelabuhan di Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 20.153 orang. Dengan jumlah penumpang paling banyak menggunakan jasa angkutan laut ini pada bulan Desember 2021.

Tabel 7. Jumlah dan Perkembangan Penumpang Angkutan Laut Pada Pelabuhan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021

Bulan	Jumlah Penumpang (orang)		Perkembangan/Perubahan (%)	
	Naik	Turun	Naik	Turun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	1.788	1.455		
Februari	1.011	742	-76,85	-96,09
Maret	1.620	1.154	37,59	35,70
April	1.517	1.397	-6,79	17,39
Mei	1.979	2.546	23,35	45,13
Juni	2.632	2.594	24,81	1,85
Juli	1.105	1.591	-138,19	-63,04
Agustus	1.250	988	11,60	-61,03
September	1.706	1.373	26,73	28,04
Oktober	2.460	2.411	30,65	43,05
November	2.306	2.236	-6,68	-7,83
Desember	1.763	1.666	-30,80	-34,21

Selain untuk angkutan penumpang, jasa transportasi laut ini juga menjadi faktor penting dalam perekonomian kabupaten Pulau Morotai yaitu dalam pengangkutan barang. Jumlah barang yang

dibongkar dan muat pada pelabuhan di Kabupaten Pulau Morotai meningkat tajam sejak adanya tol laut yang sudah mulai beroperasi pada tahun 2017. Namun, pemanfaatan tol laut belum terlalu signifikan dampaknya terhadap perekonomian.

Tabel 8. Jumlah dan Perkembangan Angkutan Barang pada Pelabuhan Laut di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021

Bulan	Jumlah Bagasi (kg)		Perkembangan/Perubahan (%)	
	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	14.186	5.304		
Februari	2.172	336	-553,13	-1.478,57
Maret	10.019	259	78,32	-29,73
April	3.127	281	-220,40	7,83
Mei	8.641	187	63,81	-50,27
Juni	2.218	134	-289,59	-39,55
Juli	6.401	182	65,35	26,37
Agustus	3.830	136	-67,13	-33,82
September	5.771	332	33,63	59,04
Oktober	3.291	356	-75,36	6,74
November	1.679	272	-96,01	-30,88
Desember	1.526	232	-10,03	-17,24

Selain transportasi laut, Kabupaten Pulau Morotai dapat diakses melalui jalur Transportasi Udara. Di Kabupaten Pulau Morotai terdapat satu bandara yaitu Bandara Pitu yang terletak di Desa Wawama Kecamatan Morotai Selatan. Jasa angkutan udara untuk umum pada tahun 2017 baru dimulai bulan April. Pada tahun

sebelumnya memang sudah ada penerbangan untuk Morotai-Ternate, namun dengan pesawat yang hanya bermuatan 10 penumpang. Namun semasa pandemic COVID-19 penerbangan di Morotai berhenti untuk sementara.

<https://morotai.kab.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://morotai.kab.bps.go.id>

Lampiran 1. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2021 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	696.687,1	721.784,3	760.375,5
B	Pertambangan dan Penggalian	827,8	862,9	909,9
C	Industri Pengolahan	63.425,9	63.410,5	56.722,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.424,2	1.545,6	1.694,2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	191,1	195,6	203,0
F	Konstruksi	138.846,3	150.614,3	168.947,7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	314.841,5	316.072,0	325.304,7
H	Transportasi dan Pergudangan	38.210,7	35.013,7	36.065,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.231,6	2.251,7	2.464,5
J	Informasi dan Komunikasi	18.279,5	19.566,6	21.373,8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	21.338,9	22.807,5	26.512,3
L	Real Estate	1.534,4	1.551,1	1.596,9
M,N	Jasa Perusahaan	1.646,7	1.716,0	1.782,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	143.476,0	151.819,9	150.830,3
P	Jasa Pendidikan	54.398,2	56.823,5	58.379,9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	23.785,9	25.760,3	26.828,8
R,S,T,U	Jasa lainnya	7.315,8	7.471,0	8.128,4
PDRB		1,528,461,5	1,579,266,5	1,648,120,0

Lampiran 2. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019-2021 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	461.653,0	473.148,4	490.637,2
B	Pertambangan dan Penggalian	550,0	558,3	573,8
C	Industri Pengolahan	48.248,0	47.771,7	42.745,0
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.062,7	1.144,1	1.252,6
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	147,2	149,2	154,4
F	Konstruksi	92.804,3	100.179,9	107.139,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	215.420,5	214.722,5	218.950,4
H	Transportasi dan Pergudangan	25.298,4	22.828,6	23.167,6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.420,4	1.428,4	1.549,6
J	Informasi dan Komunikasi	14.642,7	15.878,7	17.271,8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13.861,8	14.973,1	16.233,7
L	Real Estate	1.167,9	1.178,2	1.210,7
M,N	Jasa Perusahaan	1.181,7	1.209,1	1.234,3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	92.170,0	96.648,4	96.006,4
P	Jasa Pendidikan	40.339,7	41.461,3	41.866,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15.956,4	16.895,3	17.395,0
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.815,1	5.920,4	6.381,6
PDRB		1.031.739,8	1.056.095,7	1.083.770,1

Lampiran 3. Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2021 (Persen)

Kategori	Uraian	20189	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	45,58	45,70	46,14
B	Pertambangan dan Penggalian	0,05	0,05	0,06
C	Industri Pengolahan	4,15	4,02	3,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	9,08	9,54	10,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,60	20,01	19,74
H	Transportasi dan Pergudangan	2,50	2,22	2,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,15	0,14	0,15
J	Informasi dan Komunikasi	1,20	1,24	1,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,40	1,44	1,61
L	Real Estate	0,10	0,10	0,10
M,N	Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,39	9,61	9,15
P	Jasa Pendidikan	3,56	3,60	3,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,56	1,63	1,63
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,48	0,47	0,49
PDRB		100	100	100

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2021 (persen)

Kategori	Uraian	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,36	2,49	3.70
B	Pertambangan dan Penggalian	1,69	1,51	2.78
C	Industri Pengolahan	-0,14	-0,99	-10.52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,20	7,65	9.49
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-1,59	1,41	3.43
F	Konstruksi	8,79	7,95	6.95
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,97	-0,32	1.97
H	Transportasi dan Pergudangan	6,06	-9,76	1.48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,44	0,56	8.48
J	Informasi dan Komunikasi	9,09	8,44	8.77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,40	8,02	8.42
L	Real Estate	2,58	0,88	2.76
M,N	Jasa Perusahaan	4,25	2,32	2.08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,85	4,86	-0.66
P	Jasa Pendidikan	8,66	2,78	0.98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,83	5,88	2.96
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,99	1,81	7.79
PDRB		4.30	2.36	2.62

Lampiran 5. Laju Implisit PDRB menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019-2021 (%)

Kategori	Uraian	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,35	1,09	1.59
B	Pertambangan dan Penggalian	2,83	2,70	2.60
C	Industri Pengolahan	0,87	0,97	-0.03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,25	0,81	0.11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,22	0,91	0.38
F	Konstruksi	2,18	0,49	4.89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,21	0,72	0.93
H	Transportasi dan Pergudangan	2,52	1,55	1.50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,22	0,34	0.89
J	Informasi dan Komunikasi	-0,35	-1,29	0.43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,50	-1,05	7.22
L	Real Estate	1,13	0,20	0.19
M,N	Jasa Perusahaan	2,24	1,85	1.72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,76	0,91	0.01
P	Jasa Pendidikan	0,72	1,63	1.75
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,83	2,28	1.16
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,49	0,31	0.94
PDRB		1.88	0,94	1,69

Lampiran 6. Sumber Penerimaan Daerah & Kontribusinya di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021

Sumber Penerimaan	Penerimaan (Juta Rupiah)	Persentase
(1)	(2)	(3)
PAD	32.492.440,48	4,28
Dana Perimbangan	715.615.814,52	94,29
Lainnya	10.816.481,89	1,42
Jumlah	758.924.736,90	100

Lampiran 7. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021

PAD	Penerimaan (Juta Rupiah)	%
Pajak Daerah	5.520.285,61	16,989
Retribusi	17.886.635,92	55,04
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	391.907,49	1,20
Lain-lain PAD	8.693.611,46	26,75
Jumlah	32.492.440,48	100

Lampiran 8. Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenis
pengeluaran di Kabupaten Pulau Morotai
Tahun 2021 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran		2021
	(1)	(2)
A	Belanja Tidak Langsung	321.779.853,24
	Belanja Pegawai	187.911.119,32
	Belanja Subsidi	-
	Belanja Bantuan Keuangan	115.619.038,87
	Belanja Hibah	2.647.900
	Belanja Bantuan Sosial	15.131.093,54
	Belanja Tidak Terduga	470.701,50
B	Belanja Langsung	501.624.134,74
	Belanja Pegawai	29.137.008,43
	Belanja Barang & Jasa	177.984.232,33
	Belanja Modal	294.502.893,98
	Jumlah / Total	823.403.987,98

Lampiran 9. Jumlah dan Perkembangan Kunjungan Kapal Laut
pada Pelabuhan di kabupaten Pulau Morotai
Tahun 2021

Bulan	Jumlah Kapal
(1)	(2)
Januari	69
Februari	67
Maret	69
April	75
Mei	80
Juni	47
Juli	35
Agustus	32
September	36
Oktober	50
November	46
Desember	46

Lampiran 10. Jumlah dan Perkembangan Penumpang Angkutan Laut Pada Pelabuhan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021

Bulan	Jumlah Penumpang (orang)		Perkembangan/Perubahan (%)	
	Naik	Turun	Naik	Turun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	1.788	1.455		
Februari	1.011	742	-76,85	-96,09
Maret	1.620	1.154	37,59	35,70
April	1.517	1.397	-6,79	17,39
Mei	1.979	2.546	23,35	45,13
Juni	2.632	2.594	24,81	1,85
Juli	1.105	1.591	-138,19	-63,04
Agustus	1.250	988	11,60	-61,03
September	1.706	1.373	26,73	28,04
Oktober	2.460	2.411	30,65	43,05
November	2.306	2.236	-6,68	-7,83
Desember	1.763	1.666	-30,80	-34,21

Lampiran 11. Jumlah dan Perkembangan Angkutan Barang pada Pelabuhan Laut di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021

Bulan	Jumlah Bagasi (kg)		Perkembangan/Perubahan (%)	
	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	14.186	5.304		
Februari	2.172	336	-553,13	-1.478,57
Maret	10.019	259	78,32	-29,73
April	3.127	281	-220,40	7,83
Mei	8.641	187	63,81	-50,27
Juni	2.218	134	-289,59	-39,55
Juli	6.401	182	65,35	26,37
Agustus	3.830	136	-67,13	-33,82
September	5.771	332	33,63	59,04
Oktober	3.291	356	-75,36	6,74
November	1.679	272	-96,01	-30,88
Desember	1.526	232	-10,03	-17,24

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PULAU MOROTAI**